



Strategi Pengentasan Kemiskinan: Peran Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Ketimpangan Pendapatan Dalam Perspektif SDGS

Rufa'idah^{1, *}, Didit Purnomo²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: dp257@ums.ac.id

ABSTRAK

Masalah kemiskinan masih belum terselesaikan karena banyaknya faktor yang berkontribusi. Penelitian ini menelaah sejauh mana Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sebagai upaya mewujudkan dengan SDGs 1, yaitu tanpa kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif bersumber dari data sekunder berupa data panel. Ruang lingkup pengamatan dalam penelitian ini meliputi 35 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, dengan rentang waktu pengamatan dari 2021-2024. Data yang dikumpulkan berasal dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2021-2024. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, (2) Tingkat pengangguran terbuka memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, (3) Ketimpangan pendapatan menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 20
November 2025

First Revised 20 Desember 2025

Accepted 21 Desember 2025

First Available online 23

Desember 2025

Publication Date 23 Desember
2025

Keyword:

indeks pembangunan manusia,
kemiskinan, ketimpangan
pendapatan, pengangguran.

1. PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan merupakan masalah rumit yang sulit untuk dihindari oleh setiap negara, dan menjadi hambatan untuk mengubah negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia tak luput juga dari permasalahan kemiskinan hingga sekarang menjadi masalah yang belum teratasi dan masih menjadi tantangan (Daniel et al., 2023). Berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi pada dasarnya masalah kemiskinan ini sulit diatasi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya (Fauzi Nur Kholis & Gunarto, 2025). Beberapa faktor tersebut yang juga menjadi tantangan dalam mencapai target SDGs (Dahliah & Nirwana Nur, 2021). Hal ini menjadi perhatian utama di Indonesia, meskipun masalah kemiskinan tidak dapat dihilangkan, akan tetapi masalah tersebut tidak dapat dibiarkan karena permasalahan kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan lainnya, seperti masalah sosial, ekonomi, maupun politik (Maskur, 2023).

Indonesia secara konsisten menyelaraskan tujuan pembangunannya dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mendukung keberlanjutan global, dengan tujuan utama yaitu penghapusan kemiskinan (SDGs 1: tanpa kemiskinan). Kemiskinan umumnya muncul di negara-negara berkembang akibat berbagai faktor yang saling berkaitan (Sinaga, 2020). Siklus kemiskinan yang di paparkan oleh Nurkse menggambarkan kondisi di mana kemiskinan bersifat berkesinambungan tanpa ujung dan pangkal karena seluruh faktor penyebabnya saling terkait dan membentuk suatu siklus yang sulit diputus (Mukhtar et al., 2019). Keterkaitan antara teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse dan kerangka kerja SDGs menunjukkan bahwa kemiskinan dipandang sebagai permasalahan sistemik yang harus diselesaikan secara menyeluruh untuk memutus siklus tersebut (Salsabila & Pramukty, 2023).

Pada umumnya, kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang menghadapi kesulitan keuangan yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini biasanya muncul karena kualifikasi tenaga kerja yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan potensi ekonomi (Pertiwi & Purnomo, 2022). Ditambah dengan pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan meningkatnya pengangguran, memutus siklus kemiskinan menjadi semakin sulit, serta penurunan pertumbuhan ekonomi (Komang et al., 2021). Tidak hanya dipengaruhi faktor internal, terdapat berbagai penyebab lain yang turut berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan (Anwari & Ambariyanto, 2024).

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi yang belum merata antar daerah, yang tercermin dari tingginya ketimpangan pendapatan wilayah (Ramadhan, 2021). Perbedaan tingkat pendapatan tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, di mana kelompok berpendapatan tinggi semakin sejahtera sementara kelompok miskin semakin tertinggal. Sebagai negara berkembang, jika disandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih mencolok. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini juga dapat diamati di Provinsi Jawa Tengah, yang masih dianggap sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang cukup signifikan.

1.1 Landasan Teori

1.1.1. Kemiskinan

Klasifikasi kategori penduduk miskin mengacu pada indikator pengeluaran minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Batas ini mewakili biaya yang diperlukan untuk bertahan hidup, sehingga mereka yang pengeluarannya di bawah standar ini termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan (Safii & Huda, 2025). Secara umum, kemiskinan dibedakan menjadi empat jenis: kemiskinan absolut, yakni ketidakmampuan individu mencukupi kebutuhan dasar karena pendapatan ada dibawah standar batas garis kemiskinan; kemiskinan relatif, yaitu kondisi ketika seseorang belum mampu memenuhi standar hidup minimal yang berlaku di masyarakat meskipun kebutuhan dasarnya masih terpenuhi; kemiskinan kultural, yang timbul akibat kebiasaan atau pola perilaku yang menghambat peningkatan kualitas hidup; kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang dilatarbelakangi ketidakadilan atau ketimpangan dalam struktur dan sistem sosial (Damanik & Syafii, 2023).

1.1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dipahami sebagai parameter komprehensif yang menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk merepresentasikan tingkat kemakmuran serta kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. IPM mengukur kualitas kesehatan melalui angka harapan hidup, kemajuan pendidikan melalui angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi melalui tingkat konsumsi penduduk yang tergambar melalui dari standar pengeluaran konsumsi individu. Nilai IPM digunakan untuk mengklasifikasikan indeks pembangunan manusia ke dalam empat kelompok klasifikasi, yaitu rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Nilai IPM mewakili tingkat perkembangan manusia, dalam hal ini nilai indeks yang lebih tinggi mencerminkan keberhasilan yang lebih besar dalam memenuhi dimensi kehidupan dasar penduduk. Lebih dari sekadar indikator statistik, IPM berfungsi sebagai instrumen penting dalam menilai dampak kebijakan ekonomi dan kinerja birokrasi pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Falah & Rahmawati, 2024).

1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sederhananya, pengangguran terbuka dapat digambarkan sebagai suatu kondisi dimana individu yang termasuk dalam populasi usia kerja telah mencoba mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan gaji mereka, tetapi belum menemukan pekerjaan tersebut (Mutmainah et al., 2024). Dalam penelitian Marini & Putri (2020) menuturkan berdasar perspektif Badan Pusat Statistik mengenai definisi pengangguran yaitu mengarah pada kategori penduduk yang berusia minimal 15 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, istilah ini mencakup individu yang tergolong dalam populasi angkatan kerja namun belum terserap dan sedang berupaya mencari lapangan kerja, serta orang-orang yang sedang dalam tahap persiapan untuk memulai kegiatan wirausaha. Klasifikasi tersebut meliputi penduduk yang telah mendapatkan pekerjaan tetapi masih menunggu untuk mulai bekerja. Secara umum, pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan di pasar kerja di mana menunjukkan rendahnya daya serap di sektor ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka berdampak negatif bagi taraf pendapatan warga, yang kemudian membatasi kemampuan

individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan (Ernestus, 2022).

1.1.4. Ketimpangan pendapatan

Distribusi pendapatan merujuk pada pola distribusi ekonomi di antara individu dan kelompok dalam struktur masyarakat. Besarnya pendapatan individu digunakan sebagai dasar evaluasi utama. Salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah keberadaan kelompok dengan pendapatan rendah serta besarnya angka penduduk miskin. (Marhusen *et al.*, 2023). Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan pemerataan hasil pembangunan di suatu wilayah. Untuk mengetahui sejauh mana distribusi pendapatan tersebar merata di masyarakat, indeks Gini dan kurva Lorenz adalah yang paling umum digunakan.

1.2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

1.2.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan

Keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia dapat dinilai dan diperhitungkan secara bersamaan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat produktivitas masyarakat tercermin dalam angka IPM tersebut. Dengan kata lain, tingginya nilai IPM menunjukkan semakin besar pula produktivitas penduduk, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya IPM dapat berdampak negatif, menurunkan pendapatan penduduk. Ini terjadi karena tingkat IPM yang menentukan standar kompetensi pekerja dan berpengaruh pada produktivitas dan tingkat pendapatan (Suhendra *et al.*, 2025). Beberapa hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh antara IPM dan kemiskinan, di antaranya adalah penelitian Ningrum (2015) Penurunan tingkat kemiskinan secara empiris terbukti dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh peningkatan keberhasilan dalam pembangunan manusia di Indonesia pada periode tahun 2011-2025, setiap peningkatan IPM berpotensi menekan angka kemiskinan. Selanjutnya penelitian Fitria (2020) juga mengatakan bahwa IPM menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa semakin baik mutu sumber daya manusia, semakin rendah kerentanan ekonomi penduduk di Provinsi Jawa Barat.

1.2.2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan

Kutipan Nengsih *et al.* (2023) menyatakan pendapat Suroto bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka mengacu pada persentase individu usia produktif yang terklasifikasi sebagai angkatan kerja. Di sisi lain, partisipasi angkatan kerja menunjukkan keterlibatan seseorang yang memiliki aktivitas kerja. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka mencakup individu yang berstatus memiliki pekerjaan tetapi mengalami penghentian kerja sementara, serta seseorang yang dikategorikan menganggur. Dalam penelitian Fadhilah *et al.* (2023) menyatakan tingkat pengangguran terbuka memicu peningkatan persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia, dengan arah hubungan positif dan signifikan. Penelitian sependapat lain yaitu hasil penelitian Karolinska *et al.* (2023) yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini mencerminkan bahwa, seiring dengan meningkatnya pengangguran, jumlah penduduk miskin cenderung akan bertambah.

1.2.3. Pengaruh Ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, di mana kelompok berpendapatan tinggi semakin sejahtera sementara kelompok miskin semakin rentan (Aini & Nugroho, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi fluktuasi angka kemiskinan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat positif namun tidak signifikan. Indrawati *et al.* (2019) menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua periode 2014–2019 berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, meskipun dampaknya relatif kecil. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Aini & Nugroho (2023) di Provinsi Jawa Timur periode 2013–2020, yang menyatakan bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan cenderung diikuti kenaikan angka kemiskinan, namun demikian pengaruhnya tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.

2. METODE

2.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menerapkan data sekunder sebagai sumber informasi. Pendekatan menggunakan data sekunder berbasis panel yang menggabungkan observasi dari tahun 2021-2024 dengan data lintas wilayah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam model yang diestimasi, kemiskinan dianggap sebagai variabel yang dipengaruhi (Y), sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka berfungsi sebagai variabel yang mempengaruhi (X). Data yang dikumpulkan berasal dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan diukur dengan besaran persentase penduduk yang dalam kategori miskin, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan koefisien Gini, dan pengangguran serta pembangunan manusia diukur menggunakan tingkat pengangguran terbuka dan skor IPM, masing-masing. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang mengevaluasi berbagai sumber yang relevan.

2.2. Analisis Data

Untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel, studi ini menerapkan pendekatan regresi data panel yang meliputi CEM, FEM, dan REM. Model terbaik ditentukan melalui serangkaian pengujian, yaitu uji Chow diimplementasikan sebagai panduan dalam mengevaluasi antara CEM dan FEM. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model dasar yang digunakan memiliki tingkat validitas yang sangat baik, serta uji Hausman dilakukan untuk mempertimbangkan penggunaan FEM dengan REM. Tahapan ini penting guna menjaga keakuratan koefisien serta validitas model dalam pengolahan data panel.

Spesifikasi model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PPMit = \beta_0 + \beta_1IPMit + \beta_2TPTit + \beta_3GRit + \varepsilon it$$

Dimana:

PPM : Persentase Penduduk Miskin

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

- TPT : Tingkat PengangguranTerbuka
 GR : Gini Rasio
 ε : Error Term
 β_0 : Konstanta
 I : *Cross Section* (35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)
 t : *Time Series* (2020-2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Pemilihan Model

Untuk menentukan model regresi panel yang tepat, dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil uji disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji pemilihan model

Pengujian	Probabilitas	Signifikansi (α)	Model terpilih
Uji Chow	0,0000	0,05	FEM
Uji Hausman	0,8837	0,05	REM

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Perhitungan dari uji Chow diketahui probabilitas $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, ditetapkan bahwa FEM merupakan model paling tepat untuk digunakan dalam analisis ini. Melalui uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas $0,8837 > 0,05$. Oleh karena itu REM dipilih sebagai model terbaik.

3.2. Analisis Regresi

Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Gini Ratio terhadap variabel dependen, dilakukan analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi koefisien, beserta signifikansi statistiknya, disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil analisis regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52.09864	3.249088	16.03485	0.0000
IPM	-0.564391	0.041298	-13.66628	0.0000
TPT	-0.009500	0.047203	-0.201256	0.8408
GINI_RASIO	0.720040	1.671834	0.430689	0.6674

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Mengacu hasil tabel diatas, maka diperoleh rumus spesifikasi model sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN} = 52.0986365559 - 0.564391357616 * \text{IPM} - 0.00949993944041 * \text{TPT} + 0.720039991397 * \text{GINI_RASIO} + [\text{CX}=\text{R}]$$

Berdasarkan hasil regresi data panel, diperoleh konstanta sebesar 52,09864 yang menunjukkan bahwa ketika IPM, TPT, dan Rasio Gini diasumsikan bernilai nol atau konstan, tingkat kemiskinan berada pada angka tersebut. Variabel IPM memberikan koefisien negatif

sebesar -0,564391, yang mengindikasikan bahwa perbaikan aspek kualitas SDM berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan, di mana kenaikan 1% IPM diperkirakan mampu mengurangi persentase penduduk miskin sebesar 0,564391%. Variabel TPT juga menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,009500, hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pengangguran terbuka justru diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,009500 persen, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Sementara itu, Rasio Gini dengan hasil koefisien positif sebesar 0,720040, yang menandakan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan secara signifikan mendorong kenaikan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Uji Hipotesis

3.3.1. Uji t

Sebelum membahas hasil uji hipotesis, dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tabel 3 menyajikan nilai probabilitas, t-statistic, dan keputusan signifikansi untuk setiap variable:

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel Independen	Probabilitas	t-statistic	Keputusan
Indeks Pembangunan Manusia	0,0000	-13,66628	Signifikan
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,8408	-0,201256	Tidak Signifikan
Gini Rasio	0,6674	0,430689	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Sesuai dengan data output uji t, menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024 variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar $-13,66628 < t\text{-tabel } 1,977304$ serta nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_A diterima. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan nilai t-hitung $-0,201256 < t\text{-tabel } 1,977304$ dengan nilai signifikansi $0,8408 > 0,05$, yang menjelaskan bahwa TPT berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sehingga H_A ditolak dan H_0 diterima. Selanjutnya, variabel Gini Rasio memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,430689 lebih kecil dari t-tabel 1,977304 serta nilai signifikansi $0,6674 > 0,05$, memberikan gambaran bahwa meskipun gini rasio berkorelasi positif dengan kemiskinan, dampaknya terbukti tidak bermakna secara signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3.3.2. Uji F

Untuk menguji apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dilakukan Uji F. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji F

F-statistic	Prob (F-statistic)	Keputusan
105,8016	0,000000	Ada pengaruh

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Data output di atas memperlihatkan nilai F-hitung sebesar $105,8016 > F\text{ tabel yaitu } 2,671178$ dan nilai sig $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Hal ini membuktikan bahwa variabel IPM, TPT, dan Gini Rasio menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

3.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variasi pada variabel terikat. Hasil pengujian R-squared disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji R square

R-squared (R^2)	Adjusted R-squared
0.700047	0.693431

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Pada uji Determinasi atau R-Squared menggunakan eviews 12 memperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 0,693431 atau 69,3431%. Dapat disimpulkan bahwa IPM, TPT, dan Gini Rasio mampu menjelaskan variabel kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 69,3431%, sedangkan sisanya yaitu 30,6569% menjelaskan bahwa perubahan pada variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal lainnya yang berada di luar lingkup penelitian.

3.4. PEMBAHASAN

3.4.1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengentasan kemiskinan dalam perpektif SDGs

Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Jawa tengah memiliki nilai koefisien sebesar -0.564391 dengan tingkat signifikansi $0,0000 < \alpha = 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2021-2024. Setiap kenaikan 1% Indeks Pembangunan Manusia berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.564391%. Artinya seiring dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka dapat menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Panggabean & Matondang (2019) yang menyatakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi langsung pada penanggulangan dan penurunan persentase kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian dengan hasil yang sama dikemukakan oleh Febriant, (2024) tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam menurunkan kemiskinan di Kota Surabaya memiliki hasil negatif dan signifikan. Ardiyanto, (2021) dalam penelitiannya menyatakan pada variabel IPM memiliki hasil negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian ini menyimpulkan asumsi terkait Indeks Pembangunan Manusia berperan dalam perspektif SDGs yaitu pada strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 1 yaitu tanpa kemiskinan, sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena fakta bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar keterbatasan finansial, namun di sisi lain juga mencakup banyak aspek, seperti kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan. Kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang baik termasuk dalam tiga komponen penyusun yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur IPM. Peningkatan standar hidup seseorang dan kemampuan manusia berperan langsung dalam menurunkan tingkat kemiskinan sehingga hal ini menjadi cara tepat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Ketika individu memiliki kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang lebih baik, mereka akan lebih mudah mengakses pasar kerja yang layak dan meningkatkan hasil kerja sehingga mengurangi kemungkinan mereka terjebak dalam kemiskinan.

Sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat ditemukan di daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Orang dengan kualitas kesehatan dan berpendidikan yang baik maka menunjukkan lebih siap secara ekonomi untuk memasuki pasar kerja yang memberikan upah memadai dan sekaligus memperbaiki standar hidup. (Tirta & Putri, 2025). Penurunan angka kemiskinan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Hasil ini seiring dengan pemikiran teori pemberdayaan atau empowerment yang percaya bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, daerah yang catatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi selalu memiliki persentase kemiskinan yang rendah dan kualitas hidup yang baik. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan menginvestasikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi lebih baik di dunia kerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Lisda, 2021).

3.4.2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pengentasan kemiskinan dalam perpektif SDGs

Tingkat pengangguran terbuka dinyatakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2021-2024. Nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu -0.009500 dan nilai signifikansi $0,8408 > \alpha = 0,05$ yang artinya pada 1% kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak -0.009500 di Jawa Tengah. Hasil penelitian yang sama yaitu oleh Aulia *et al.* (2023) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Firdaus *et al.*, (2025) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil yang sama yaitu tingkat pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan dapat diartikan bahwa pengangguran tidak secara otomatis memicu kenaikan tingkat kemiskinan.

Meskipun hasil penelitian bertentangan dengan teori umum yang mengasumsikan adanya korelasi positif antara pengangguran dan kemiskinan. Dengan kata lain, pengangguran seharusnya akan meningkatkan kemiskinan karena pengangguran berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Dalam penelitian Sembiring *et al.* (2020) yang mendapatkan hasil berbeda tetapi sejalan dengan teori umum yang memperoleh hasil positif, dimana pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat, apabila persentase pengangguran meningkat, secara otomatis akan memicu pertumbuhan populasi miskin. Hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat Shihab, (2025) yang mengungkapkan bahwa pengangguran terbuka bernilai positif signifikan dengan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta.

Mayoritas dari penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran menjadi faktor pendorong naiknya angka kemiskinan. Ketidaksesuaian hasil dalam penelitian dengan teori umum tentang hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini diperkirakan karena adanya pengangguran tersembunyi, yaitu mereka yang durasi kerjanya di bawah standar jam kerja pada umumnya tetapi dicatat sebagai pekerja. Kondisi ini cenderung terjadi di sektor rumah tangga pertanian (Ardian *et al.*, 2021). Jumlah pengangguran yang tinggi tidak selalu berarti bahwa angka kemiskinan juga tinggi, kondisi ini bergantung pada berbagai faktor pendukung lainnya di suatu daerah. Selain itu tidak semua orang yang menganggur secara otomatis termasuk dalam kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan, karena kebutuhan sehari-hari mereka mungkin masih dapat dipenuhi oleh penghasilan anggota keluarga yang lain. Sebaliknya, individu yang sudah

bekerja belum tentu bisa terhindar dari garis kemiskinan (Aliyah *et al.*, 2025). Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten ini menandakan bahwa adanya gap penelitian, terutama dalam menganalisis perbedaan karakteristik daerah, susunan ekonomi, dan kebijakan sosial yang mempengaruhi kaitan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Secara rasional, pengangguran biasanya berhubungan dengan kemiskinan karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tidak mendapatkan pendapatan. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh angkatan kerja yang belum terserap di pasar tenaga kerja orang secara otomatis mengalami kemiskinan. Ketika angka pengangguran terbuka bertambah, tingkat kemiskinan seringkali berkurang, tetapi dampak tersebut tidak cukup signifikan untuk dianggap mempengaruhi secara nyata. Dalam fenomena pengangguran terbuka, mayoritas didominasi oleh pencari kerja yang baru memulai, termasuk para lulusan baru yang tengah mencari pekerjaan yang sesuai. Selama mereka masih mendapat dukungan ekonomi dari keluarga, peningkatan angka pengangguran terbuka tidak memberikan dampak besar terhadap peningkatan jumlah orang miskin. Sejalan dengan Target Tujuan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya cukup dengan mengurangi tingkat pengangguran, karena kemiskinan merupakan suatu permasalahan kompleks yang dipicu oleh berbagai variabel. Maka dari itu, untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan, kualitas pekerjaan harus diperbaiki bersama dengan peningkatan jaminan sosial, dan fokus harus dialihkan dari hanya menciptakan lapangan kerja menjadi memastikan bahwa pekerjaan tersebut memberikan gaji yang layak.

3.4.3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan dalam perpektif SDGs

Dalam hasil pengujian ini variabel ketimpangan pendapatan yang dihitung menggunakan indeks gini rasio memperoleh hasil positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai koefisien sebesar 0,720040 dan nilai signifikansi yaitu $0,6674 > \alpha = 0,05$. Artinya pada setiap 1% kenaikan gini rasio maka akan turut meingkatkan penduduk miskin sebesar 0,720040% di Jawa Tengah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Aini & Nugroho (2023) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berdampak positif yang tidak signifikan bagi kemiskinan di Jawa Timur pada periode pengamatan 2013-2020, dimana ketika terjadi pertumbuhan ketimpangan pendapatan maka angka kemiskinan juga akan naik. Dengan kata lain, walaupun peningkatan ketimpangan pendapatan menyebabkan kenaikan pada tingkat kemiskinan, tetapi dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya, Prasetyoningrum *et al.* (2018) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, dimana jika terjadi kenaikan pada ketimpangan pendapatan justru akan menurunkan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara.

Sebaran pendapatan yang tidak merata di antara individu menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini yang kemudian memengaruhi timbulnya perbedaan dalam masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Keadaan menegaskan bahwa distribusi pendapatan masih belum berjalan dengan efisien. Ini terlihat jelas dari ketidaksetaraan pendapatan yang masih ada, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pembangunan. (Dianti *et al.*, 2024). Ketimpangan pendapatan termasuk faktor dalam menentukan kemiskinan. Akar dari masalah kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya penghasilan yang diperoleh. Di samping itu, sebagian besar keluarga miskin terdiri dari banyak anggota, sehingga tekanan ekonomi

mereka bertambah. Kondisi ini menjadi lebih rumit dengan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. (Nisa *et al.*, 2020).

Dilihat dari perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menunjukkan bahwa adanya ketimpangan besar dalam penghasilan dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Ketidakmerataan pendapatan terus menjadi masalah yang harus dihadapi dalam jangka panjang. Tingginya tingkat ketidakmerataan dapat menghambat akses bagi penduduk miskin untuk mendapat pendidikan yang baik, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang pantas. Namun, potensi buruk ini dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat, seperti program perlindungan sosial dan usaha untuk meratakan akses terhadap layanan dasar. Tindakan ini selaras dengan tujuan SDGs yang mendorong perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, meskipun masalah ketidaksetaraan pendapatan masih tetap menjadi persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa cara efektif untuk mempercepat pencapaian SDG secara keseluruhan adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki sistem pemerintahan, dan memperluas akses pendidikan. Untuk mencapai hal ini, para pengambil keputusan perlu fokus pada penciptaan pekerjaan yang berkelanjutan, menyediakan akses pendidikan yang adil, dan mendukung kerangka kerja pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan langkah ini, kemiskinan dan ketidakadilan dapat diminimalkan. (Bhale *et al.*, 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga kualitas pembangunan manusia, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga perbaikan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan standar hidup layak menjadi strategi paling efektif dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan hubungan negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan SDGs Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) yang menekankan perlunya pendekatan jangka panjang dan komprehensif, tidak semata-mata hanya melalui pertumbuhan ekonomi atau penurunan pengangguran, melainkan juga melalui peningkatan kesejahteraan, pemerataan layanan dasar, dan penguatan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan pada investasi modal manusia melalui indikator kualitas pendidikan dan aksesibilitas layanan kesehatan guna mendorong optimalisasi kesempatan kerja yang berkualitas dan memiliki nilai produktivitas yang tinggi dengan upah serta perlindungan yang memadai, serta mempertahankan dan memperluas program sosial untuk melindungi kelompok rentan dari dampak ketimpangan pendapatan. Guna melengkapi keterbatasan ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis lebih dalam variabel dan periode analisis agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

5. REFERENCES

- Anwari, C., & Ambariyanto, A. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Jabodetabek. *Neo-Bis*, 13(2), 204–218.
- Ardiyanto. (2021). The Influence Of Economic Growth, Human Development Index, And Open Unemployment Rate On Poverty Levels In Sumenep Regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Ijse)*, 32(3), 167–186.
- Dahliah, D., & Nirwana Nur, A. (2021). The Influence Of Unemployment, Human Development Index And Gross Domestic Product On Poverty Level. *Golden Ratio Of Social Science And Education*, 1(2), 95–108. <https://doi.org/10.52970/grsse.v1i2.84>
- Damanik, M., & Syafii, M. (2023). Analysis Of The Effect Of Economic Growth, Open Unemployment Rate, Human Development Index On The Number Of Poor People In Sumatra Island Using Panel Data. *Management And Technology*, 2, 695–709. <https://doi.org/10.56910/ictmt.v1i2.150>
- Daniel, H., Purba, N., & Simamora, N. (2023). The Effect Of Economic Growth, Open Unemployment Rate And Human Development Index On Poverty In North Sumatra. *Indonesian Journal Of Advanced Research*, 2(5), 391–402. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4145>
- Ernestus. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Umkm, Indeks Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di 5 Negara Asean. *Sepakat Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 1–275. <https://www.tnp2k.go.id>
- Fadhilah, M. H., Muchtar, M., & Robinson Sihombing, P. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (Jmpkp)*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4782>
- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The Grdp Per Capita, Human Development Index, Open Unemployment Rate, Regional Expenditure, And Poverty In East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327>
- Fauzi Nur Kholis, & Gunarto, T. (2025). Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung (2012-2023). *Eco-Buss*, 7(3), 2128–2142. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i3.2243>
- Febriant, E. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Timur Periode Tahun 2020-2024. *Jurnal Edueco*.
- Firdaus, A. S., Hafizdhah, I. N., & Ernia, O. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Tingkat Pengangguran Terbuka , Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Provinsi Lampung The Influence Of The Human Development Index , Open Unemployment Rate , And Minimum Wage On Poverty Leve. *Jicn : Jurnal Intelek*

Dan Cendekiawan Nusantara, 2(6), 11465–11480.

- Komang, N., Lestari, S., Agung, A., Ngurah Marhaeni, I., Gusti, I., & Yasa, W. M. (2021). Does Human Development Index (Hdi), Investment, And Unemployment Effects On Economic Growth And Poverty Levels? (A Case Study In Bali). *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research*, 5, 416–426. www.ajhssr.com
- Lisda. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022. *Jurnal Ekonomi Syariah Stai Darul Ulum Kandungan*, 32(3), 167–186.
- Maskur, S. R. R. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan , Pengangguran Dn Pembangunan Corresponding Author : Sitti Rachma Ramadhani Maskur 82 Corresponding Author : Sitti Rachma Ramadhani Maskur 83. *Jurnal Proged Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). The Analysis Of The Effects Of Human Development Index. *Jurnal Ecoplan*, 2(2), 77–89.
- Mutmainah, S., Rahayu, N. W. I., Fauzan, F., & Sholichin, A. A. (2024). The Influence Of Zakat, Human Development Index, Open Unemployment Rate, And Income On Poverty In Indonesia. *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 363–382. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art20>
- Pertiwi, E., & Purnomo, D. (2022). Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product (Grdp), Human Development Index (Ipm), And Open Unemployment Rate (Tpt) On Poverty Rate In Lampung Province. *International Conference On Islamic Economics, Islam Finance, & Islamic Law (Icieifil)*, 47–61.
- Ramadhan, F. . A. S. . K.-K. S. & P. R. (2021). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2).
- Safii, M. A., & Huda, S. (2025). An Examination Of The Impact Of Poverty, Unemployment, And The Human Development Index On Economic Growth In Central Java. *Formosa Journal Of Multidisciplinary Research*, 4(5), 2027–2042. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i5.171>
- Salsabila, N. A., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 436–445. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1586>
- Shihab, A. (2025). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(1).
- Sinaga, M. (2020). Analysis Of Effect Of Grdp (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment And Hdi (Human Development Index) On Poverty. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 3(3), 2309–2317. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1177>
- Suhendra, H., Sakti, A. I., Khaffi, M. A., & Dalimunthe, D. Y. (2025). Analysis Of Population , Poverty , Unemployment Rate , And Gini Ratio On Human Development Index In Bangka

Rufa'idah, Didit Purnomo., Strategi Pengentasan Kemiskinan: Peran Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Ketimpangan Pendapatan Dalam Perspektif SDGS | 1200 Belitung. Journal Of Natural Sciences And Mathematics Research, 11(1), 47–56.